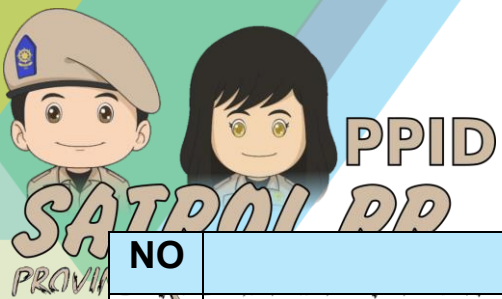


PERATURAN TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	NOMOR PERATURAN	TENTANG
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014	Aparatur Sipil Negara
2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014	Pemerintah Daerah
3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010	Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018	Satuan Polisi Pamong Praja
5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010	Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja
6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011	Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011	Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012	Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja
10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013	Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
11.	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
12.	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021	Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.



NO	NOMOR PERATURAN	TENTANG
13.	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/49/2013	Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
14.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Tanggal 04 Januari 2021	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

